

# PERAN KEPALA MADRASAH DALAM PENGELOLAAN PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) UNTUK PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH NU MARON

Taupiq Dian Saputra<sup>1</sup>, Ismatul Izzah<sup>2</sup>, Sollah Solehudin<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan,  
Indonesia

Email : Taufiqdians@gmail.com<sup>1</sup>, ismaizza83@gmail.com<sup>2</sup>, sollahsolehudin7@gmail.com<sup>3</sup>

Received: June 2026

Accepted: June 2026

Published: July 2026

## Abstract :

*This study aims to examine the role of the madrasah principal in managing the Smart Indonesia Card (KIP) Program and its contribution to improving the quality of education at Madrasah Aliyah NU Maron. The KIP Program is a government initiative aimed at expanding access to education for students from underprivileged families. In its implementation, the madrasah principal plays a crucial role in the planning, implementation, monitoring, and evaluation of the program. This research method uses a qualitative approach through case studies. Data collection was conducted through interviews, observations, and document collection. The research findings indicate that the madrasah principal functions as a manager, leader, and supervisor to ensure the KIP program is implemented effectively and according to its objectives. In addition, the madrasah principal also plays a role in increasing transparency and accountability in the management of KIP funds. Effective management of the KIP program has been shown to have positive effects on improving the quality of education, such as increased student participation, decreased dropout rates, and increased student enthusiasm for learning. Therefore, the active role and capabilities of the madrasah principal are crucial elements in optimizing the implementation of the KIP program to support improved educational quality in madrasahs.*

**Keywords:** Madrasah Principal; Smart Indonesia Card (KIP); Education Quality; Program Management

## Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepala madrasah dalam mengelola Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah NU Maron. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dalam pelaksanaannya, kepala madrasah memiliki peran yang sangat penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah berperan sebagai manajer, pemimpin, sekaligus supervisor dalam memastikan pelaksanaan Program KIP berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala madrasah juga berperan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana KIP. Pengelolaan Program KIP yang efektif terbukti memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan, yang ditunjukkan melalui meningkatnya partisipasi peserta didik, menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya motivasi belajar siswa. Oleh karena itu, peran aktif dan kompetensi kepala madrasah menjadi faktor yang sangat menentukan dalam mengoptimalkan pelaksanaan Program KIP sebagai

upaya mendukung peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Kata Kunci: Kepala Madrasah, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Mutu Pendidikan, Manajemen Program.

**Kata Kunci:** Kepala Madrasah; Kartu Indonesia Pintar (KIP); Mutu Pendidikan; Manajemen Program

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah elemen kunci dalam meningkatkan kualitas manusia dan menjadi indikator penting dalam perkembangan suatu negara. Dalam usaha untuk mencapai pendidikan yang adil dan berkualitas, pemerintah Indonesia memperkenalkan berbagai program bantuan pendidikan, salah satunya adalah Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Tujuan dari program ini adalah untuk mendukung siswa dari keluarga yang kurang mampu agar mereka dapat mengakses layanan pendidikan dengan baik tanpa terhalang masalah finansial (Mardizal et al. 2023) .

Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama, madrasah memainkan peran penting dalam mendukung keberhasilan program pemerintah tersebut. Dalam konteks ini, kepala madrasah memiliki tanggung jawab utama sebagai pemimpin dan pengelola institusi pendidikan. Kepala madrasah bertanggung jawab tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi berbagai program, termasuk pengelolaan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program KIP secara faktual meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Bantuan finansial yang diberikan melalui KIP mengurangi beban biaya pendidikan yang seringkali menjadi penghalang utama bagi anak-anak dari keluarga dengan kondisi ekonomi sulit untuk melanjutkan sekolah (A. Lestari et al., 2023). Dana KIP dapat digunakan untuk berbagai keperluan sekolah seperti pembelian seragam, buku pelajaran, alat tulis, dan biaya transportasi, sehingga meringankan tanggungan orang tua (Kurnia Mira Lestari et al., 2024). Data statistik partisipasi sekolah dan angka putus sekolah sebelum dan sesudah implementasi KIP menunjukkan adanya tren peningkatan angka partisipasi dan penurunan angka putus sekolah, terutama di kalangan siswa dengan latar belakang ekonomi lemah. Selain itu, testimoni dari siswa penerima KIP dan orang tua mereka seringkali menyoroti bagaimana program ini memungkinkan anak-anak mereka untuk tetap bersekolah dan tidak lagi terancam putus sekolah karena alasan biaya.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang diluncurkan pada tahun

2014 bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan bagi siswa kurang mampu di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa KIP telah berhasil meningkatkan tingkat partisipasi pendidikan dan menurunkan tingkat putus sekolah. Namun, tantangan implementasi tetap ada, termasuk penargetan yang tidak akurat, pencairan dana yang tertunda, dan bantuan yang tidak memadai. Efektivitas program ini bervariasi di seluruh wilayah, dengan beberapa area melaporkan keberhasilan pemanfaatan dana untuk tujuan pendidikan (Yusni et al., 2026).

Berdasarkan berbagai laporan implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di berbagai daerah, masih ditemukan sejumlah persoalan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Permasalahan tersebut meliputi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat perbedaan data sosial ekonomi, keterlambatan proses pencairan dana, lemahnya pengawasan terhadap pemanfaatan dana oleh peserta didik, serta belum optimalnya koordinasi antara pihak sekolah, orang tua, dan instansi terkait. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Program KIP tidak hanya bergantung pada besarnya bantuan yang diberikan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola program di tingkat satuan pendidikan, khususnya kemampuan kepala madrasah dalam mengelola administrasi, melakukan verifikasi penerima, membangun komunikasi dengan orang tua, serta melakukan monitoring penggunaan bantuan sehingga benar-benar mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik.

Pengelolaan KIP yang efisien di madrasah memerlukan kepemimpinan yang mampu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepala madrasah dituntut untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan mencapai target yang tepat, dikelola dengan baik, serta memberikan dampak yang jelas terhadap peningkatan kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil akademik, tetapi juga meliputi proses pembelajaran, fasilitas yang tersedia, serta kesejahteraan peserta didik.

Penelitian-penelitian sebelumnya juga menunjukkan korelasi positif antara bantuan finansial pendidikan dengan peningkatan angka partisipasi sekolah. Implementasi KIP membawa perubahan signifikan dalam dinamika pengelolaan keuangan di tingkat sekolah (Firdaus et al., 2024). Sekolah kini memiliki sumber pendanaan tambahan yang harus dikelola secara terpisah dari dana reguler seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini menuntut adanya mekanisme akuntansi dan pelaporan yang spesifik

untuk dana KIP, termasuk identifikasi siswa penerima, pencairan dana, penggunaan dana, dan pertanggungjawabannya.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas efektivitas Program Kartu Indonesia Pintar, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pengaruh bantuan KIP terhadap motivasi belajar, peningkatan prestasi akademik, angka partisipasi sekolah, maupun penurunan angka putus sekolah. Penelitian terdahulu juga lebih banyak mengkaji aspek kebijakan dan efektivitas program dari sudut pandang penerima bantuan ataupun evaluasi kebijakan pemerintah. Sementara itu, kajian yang secara khusus mengulas bagaimana peran kepala madrasah sebagai aktor utama dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan akuntabilitas pelaksanaan Program KIP di tingkat madrasah masih relatif terbatas. Padahal, keberhasilan implementasi program sangat dipengaruhi oleh kualitas kepemimpinan kepala madrasah dalam menjalankan fungsi manajerialnya.

Bendahara dan kepala sekolah harus beradaptasi dengan prosedur baru ini. Observasi terhadap praktik pengelolaan keuangan di sekolah-sekolah yang menerima dana KIP menunjukkan adanya penambahan beban administrasi terkait pelaporan dana KIP. Selain itu, audit keuangan sekolah juga kini mencakup pemeriksaan khusus terhadap pengelolaan dana KIP untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi. Terdapat potensi ketidakmerataan dalam distribusi dan efektivitas penggunaan dana KIP antar sekolah dan antar siswa. Meskipun KIP ditujukan untuk siswa kurang mampu, mekanisme pendataan dan verifikasi penerima bisa saja tidak sempurna, mengakibatkan adanya siswa yang seharusnya menerima tetapi terlewat, atau sebaliknya (Mardatila, 2025). Selain itu, efektivitas penggunaan dana juga bergantung pada kesadaran dan prioritas masing-masing siswa dan keluarga, serta pengawasan dari pihak sekolah. Studi kasus di berbagai daerah mungkin menunjukkan adanya disparitas dalam jumlah penerima KIP antar sekolah dengan proporsi siswa kurang mampu yang relatif sama. Selain itu, kurangnya pengawasan dan evaluasi yang ketat terhadap penggunaan dana di tingkat mikro dapat mengurangi dampak optimal dari program ini.

Madrasah Aliyah NU Maron sebagai salah satu institusi pendidikan menengah yang berlandaskan agama turut serta dalam pelaksanaan program KIP untuk mendukung kesinambungan pendidikan bagi siswa-siswinya. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ada sejumlah kendala yang dihadapi, seperti keabsahan data penerima, pengawasan atas penggunaan dana,

serta peningkatan pemanfaatan bantuan untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya karena tidak hanya mengevaluasi efektivitas Program KIP sebagai bantuan pendidikan, tetapi juga menempatkan kepala madrasah sebagai fokus utama dalam proses pengelolaan program. Penelitian ini mengkaji secara komprehensif bagaimana fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang dilakukan kepala madrasah berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah NU Maron. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai manajemen pendidikan Islam, khususnya dalam pengelolaan program bantuan pendidikan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepala madrasah dalam pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta mengidentifikasi kontribusinya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah NU Maron. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan kajian manajemen pendidikan Islam serta menjadi rekomendasi praktis bagi madrasah dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan program bantuan pendidikan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran (Mira, 2024).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan fokus pada penelitian deskriptif. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami secara mendalam peran kepala madrasah dalam pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di Madrasah Aliyah NU Maron. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti bisa mengumpulkan informasi secara menyeluruh mengenai kejadian-kejadian yang ada di lapangan (Ardyan et al., 2023).

Lokasi penelitian ini berlokasi di Madrasah Aliyah NU Maron. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada fakta bahwa madrasah tersebut merupakan salah satu institusi pendidikan yang menerapkan program KIP dan mempunyai relevansi dengan tema penelitian.

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari kepala madrasah, wakil kepala madrasah, para guru, staf administrasi, siswa dan orang tua siswa yang menerima KIP. Penetapan subjek penelitian dilakukan dengan metode

purposive sampling, yakni pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam pengelolaan program KIP.

Penelitian ini akan menggunakan kombinasi sumber data primer dan sekunder untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran kepala sekolah untuk penggunaan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam perspektif manajemen keuangan sekolah. Data primer akan dikumpulkan langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak kunci di MA Maron, termasuk kepala sekolah, bendahara, guru, dan perwakilan siswa, orang tua siswa penerima KIP serta staf administrasi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mendalam mengenai proses pengelolaan dana KIP, tantangan yang dihadapi, dampak program terhadap keuangan sekolah dan siswa, serta persepsi dan pengalaman mereka terkait implementasi KIP (Mohamad & Syahnur, 2025).

Selain itu, observasi langsung terhadap praktik pengelolaan keuangan dan pemanfaatan fasilitas sekolah yang mungkin dipengaruhi oleh dana KIP juga akan dilakukan. Di sisi lain, data sekunder akan diperoleh dari dokumen-dokumen resmi sekolah terkait pengelolaan keuangan, laporan penggunaan dana KIP, catatan rapat, serta data siswa penerima KIP (N. Lestari et al., 2024). Dokumen-dokumen kebijakan terkait program KIP dari tingkat pusat dan daerah juga akan dianalisis untuk memahami kerangka regulasi dan implementasi program. Kombinasi data primer dan sekunder ini diharapkan dapat memberikan triangulasi data yang kuat dan menghasilkan temuan penelitian yang valid dan reliabel.

**Tabel 1** Data Informan

No	Kriteria Informan	Kode Info	Jenis Kelamin		Jumlah
			Lk	Pr	
1	Kepala Madrasah	KM	1		1
2	Wakil Kepala Madrasah	WKM	1		1
3	Para Guru	PG	3	2	5
4	Staf Administrasi	SA	1		1
5	Para Orang tua Siswa	POS	3	2	5
6	Para Siswa	PS	5	4	9

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik yang saling melengkapi. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala

madrasah serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memperoleh informasi secara komprehensif mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Selain itu, observasi dilakukan secara langsung di lokasi penelitian untuk mengamati kondisi nyata serta pelaksanaan pengelolaan Program KIP di lingkungan madrasah. Adapun dokumentasi digunakan sebagai teknik pendukung dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang relevan, seperti data penerima KIP, laporan penggunaan dana, serta arsip administrasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Kombinasi ketiga teknik tersebut diharapkan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk memastikan keakuratan informasi, studi ini menerapkan metode triangulasi, mencakup triangulasi sumber, triangulasi metode dan triangulasi pengamat. Triangulasi sumber dilakukan dengan mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai narasumber (kepala sekolah, bendahara, guru, siswa, orang tua) serta dari dokumen-dokumen yang relevan, sementara triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil dari wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Jika terdapat kesamaan atau konvergensi temuan dari berbagai metode, maka kredibilitas data akan semakin kuat. Terakhir, triangulasi pengamat akan melibatkan diskusi hasil temuan dengan kolega peneliti atau pembimbing untuk mendapatkan perspektif yang berbeda dan mengurangi potensi bias interpretasi peneliti tunggal. Dengan penerapan teknik analisis data Miles dan Huberman serta teknik pemeriksaan keabsahan data yang komprehensif ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Metode analisis data dalam studi ini menggunakan model analisis interaktif yang terbagi menjadi tiga fase, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses reduksi data dilakukan dengan memilah dan menyederhanakan informasi yang diperoleh di lapangan, penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan menginterpretasikan data untuk menjawab fokus penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Positif KIP Terhadap Motivasi Dan Prestasi Belajar Siswa, Dengan Catatan Pada Penggunaan Dana Yang Tepat Guna**

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu siswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan yang diterima memberikan dampak positif terhadap motivasi belajar. Siswa mengungkapkan bahwa dana KIP dimanfaatkan untuk membeli buku, alat tulis, mencetak tugas sekolah, serta memenuhi berbagai kebutuhan penunjang selama proses pembelajaran. Ketersediaan sarana belajar tersebut membantu siswa dalam memenuhi kebutuhan akademiknya sehingga dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih optimal. Selain itu, pemenuhan kebutuhan pendidikan melalui dana KIP juga mengurangi kekhawatiran siswa terhadap keterbatasan biaya yang sebelumnya sering menjadi hambatan dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan finansial melalui KIP tidak hanya berfungsi sebagai dukungan ekonomi bagi keluarga, tetapi juga memberikan rasa aman dan ketenangan psikologis yang memungkinkan siswa lebih fokus pada kegiatan belajar (Sariri & Prabawati, 2024).

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh salah satu siswa penerima KIP berikut ini: *"Senang dapat KIP. Uangnya bisa buat beli buku, pulpen, sama kalau ada PR disuruh ngeprint atau fotokopi jadi bisa. Terus kalau butuh jajan sedikit di sekolah biar ada tenaga waktu belajar. Jadi nggak mikir nanti mau pinjam uang siapa kalau ada perlu. Rasanya lebih tenang saja kalau lagi di kelas, bisa dengarkan guru enak-enak, nggak kepikiran di rumah ada masalah uang atau nanti pulang sekolah gimana. Kalau dulu kan kadang kepikiran gimana nanti kalau ada tugas kelompok terus butuh biaya, jadi agak malas ikut. Sekarang lebih semangat saja sekolahnya, mau fokus belajar biar pintar."* (PS)

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan bantuan KIP tidak hanya membantu pemenuhan kebutuhan belajar secara material, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan motivasi intrinsik siswa. Berkurangnya tekanan ekonomi yang dirasakan siswa mendorong munculnya rasa percaya diri, ketenangan dalam mengikuti pembelajaran, serta semangat yang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan akademik. Dengan demikian, bantuan pendidikan yang tepat sasaran dapat menciptakan kondisi belajar yang lebih kondusif bagi siswa dari keluarga kurang mampu.

Temuan penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya korelasi positif antara penerimaan KIP dengan peningkatan tingkat kehadiran siswa di sekolah serta perbaikan capaian akademik pada mata pelajaran tertentu (Habibi, 2025). Meskipun demikian, efektivitas program KIP dalam meningkatkan prestasi belajar tidak hanya

ditentukan oleh besarnya bantuan yang diterima, tetapi juga oleh ketepatan pemanfaatan dana tersebut untuk kebutuhan pendidikan (Sitompul et al., 2024). Dana KIP yang digunakan sesuai dengan tujuan program, seperti pembelian perlen (Nikmah et al., 2020) Dana KIP yang digunakan sesuai dengan tujuan program, seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku, dan kebutuhan penunjang pembelajaran lainnya, berpotensi memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap peningkatan kualitas belajar siswa.

Di sisi lain, masih terdapat tantangan dalam implementasi program KIP, terutama ketika dana bantuan tidak sepenuhnya digunakan untuk kebutuhan pendidikan, melainkan dialokasikan untuk kebutuhan lain di luar konteks sekolah akibat kurangnya pemahaman mengenai tujuan program atau lemahnya pengawasan penggunaan dana (Rachman, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada mekanisme pendampingan yang dilakukan setelah bantuan diterima.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan pemanfaatan dana KIP berjalan sesuai dengan tujuan program. Sekolah perlu melakukan pendampingan dan edukasi kepada siswa penerima maupun orang tua mengenai prioritas penggunaan dana, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Selain itu, pemberian informasi yang jelas mengenai peruntukan dana KIP serta penguatan komunikasi antara sekolah, orang tua, dan siswa dapat menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program dalam mendukung peningkatan kualitas belajar dan motivasi akademik siswa.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat Program KIP tidak hanya dirasakan dalam bentuk bantuan ekonomi, tetapi juga memberikan dampak psikologis yang positif bagi peserta didik. Berkurangnya kekhawatiran terhadap biaya pendidikan membuat siswa lebih fokus mengikuti pembelajaran, lebih percaya diri dalam berpartisipasi di kelas, serta memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik. Kondisi ini memperlihatkan bahwa penggunaan dana KIP sesuai dengan kebutuhan pendidikan mampu menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif sehingga berpotensi meningkatkan kehadiran dan capaian belajar siswa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KIP memberikan dukungan finansial yang memungkinkan siswa

memenuhi kebutuhan belajar esensial dan mendapatkan sedikit uang saku, mengurangi kekhawatiran finansial harian (Disty, 2025)

### **Peningkatan Akses dan Partisipasi Pendidikan yang Signifikan, Namun Distribusi Belum Merata**

Hasil penelitian di Madrasah Aliyah NU Maron menunjukkan bahwa Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) berperan penting dalam meningkatkan akses pendidikan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu. Berdasarkan hasil wawancara dengan orang tua siswa penerima KIP, bantuan tersebut menjadi faktor pendukung utama yang memungkinkan anak tetap melanjutkan pendidikan ke jenjang Madrasah Aliyah meskipun kondisi ekonomi keluarga terbatas. Dana bantuan dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pendidikan, seperti pembelian seragam sekolah, buku pelajaran, alat tulis, tas, serta kebutuhan penunjang lainnya yang sebelumnya sulit dipenuhi oleh keluarga.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu orang tua siswa penerima KIP sebagai berikut: *“Alhamdulillah sekali anak saya dapat KIP. Kalau tidak ada bantuan ini, mungkin anak saya yang nomor dua ini tidak bisa lanjut MA. Suami saya cuma buruh harian, pendapatannya tidak pasti, buat makan sehari-hari saja pas-pasan. Setiap tahun ajaran baru, kami selalu pusing memikirkan biaya seragam, beli buku, sepatu baru. Dengan KIP ini, beban kami terasa sangat ringan. Uang KIP itu kami gunakan untuk beli seragam pramuka yang mahal, beli buku paket, tas, dan alat tulis. Sisanya sedikit buat uang saku dia seminggu, biar semangat berangkat sekolah. Anak saya juga jadi lebih percaya diri di sekolah karena perlengkapannya sama dengan teman-temannya. Tadinya dia sering malu kalau seragamnya sudah lusuh atau sepatunya bolong. Jadi, bantuan KIP ini benar-benar membuat anak saya bisa terus sekolah tanpa khawatir soal biaya. Memang waktu pertama kali dapat kartunya agak lama urusannya, bolak-balik sekolah dan bank. Terus ada juga tetangga yang kondisinya mirip kami, bahkan lebih susah, tapi anaknya belum dapat KIP sampai sekarang, padahal sudah diusulkan sekolah. Kadang jadi timbul pertanyaan di lingkungan. Tapi bagi kami yang menerima, ini berkah luar biasa. Sekolah juga bantu menguruskan kalau ada kesulitan, tapi memang prosesnya kadang bikin kami bingung, apalagi kami kan orang awam.”* (POS)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa KIP tidak hanya berfungsi sebagai bantuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, tetapi juga menjadi instrumen yang mendukung keberlanjutan pendidikan peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah. Bantuan yang diterima mampu mengurangi hambatan ekonomi yang sering kali menjadi penyebab rendahnya

partisipasi pendidikan pada jenjang menengah. Dengan terpenuhinya kebutuhan sekolah, peserta didik memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mempertahankan keberlangsungan studinya tanpa harus terbebani oleh persoalan biaya pendidikan.

Selain itu, temuan penelitian mengindikasikan bahwa manfaat KIP tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada aspek psikologis siswa. Ketersediaan perlengkapan sekolah yang memadai membuat siswa merasa lebih percaya diri dalam berinteraksi dan mengikuti aktivitas pembelajaran di lingkungan madrasah. Kondisi ini menunjukkan bahwa bantuan pendidikan dapat berkontribusi terhadap peningkatan rasa percaya diri dan kenyamanan belajar siswa, yang pada akhirnya berpotensi mendukung keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran secara lebih optimal.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan Program KIP masih menghadapi sejumlah kendala dalam aspek distribusi dan penyaluran bantuan. Informan menyampaikan bahwa proses administrasi pada tahap awal pencairan bantuan memerlukan waktu yang relatif lama serta prosedurnya dianggap cukup kompleks bagi sebagian orang tua. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan administratif yang dapat memengaruhi efektivitas implementasi program di tingkat penerima manfaat. Bagi keluarga dengan tingkat literasi administrasi yang terbatas, prosedur yang kurang dipahami berpotensi menimbulkan kebingungan dan memperlambat proses pemanfaatan bantuan.

Selain kendala administratif, penelitian ini juga menemukan adanya indikasi belum meratanya distribusi bantuan. Beberapa keluarga yang dinilai memiliki kondisi ekonomi serupa bahkan lebih rendah dibandingkan penerima KIP belum tercatat sebagai penerima bantuan meskipun telah diusulkan oleh pihak madrasah. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses pendataan, verifikasi, dan penetapan penerima masih memerlukan penyempurnaan agar bantuan dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran penerima berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di lingkungan masyarakat serta mengurangi efektivitas program dalam menjangkau kelompok yang paling membutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Halim, 2024) yang menyatakan bahwa Program KIP berkontribusi terhadap peningkatan akses dan partisipasi pendidikan melalui pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu. Bantuan tersebut mampu

mengurangi hambatan ekonomi sehingga peserta didik memiliki peluang yang lebih besar untuk melanjutkan dan mempertahankan pendidikan mereka. Namun demikian, temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Samsu, 2025) yang mengungkapkan bahwa masih terdapat persoalan terkait ketepatan sasaran penerima akibat kendala dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan akses pendidikan yang dihasilkan oleh Program KIP perlu diimbangi dengan perbaikan mekanisme distribusi dan penetapan penerima manfaat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih intensif antara madrasah, orang tua, pemerintah, dan instansi terkait dalam proses pendataan, verifikasi, serta pemantauan penerima bantuan. Transparansi informasi, validitas data penerima, dan kemudahan prosedur administrasi menjadi aspek penting yang perlu diperkuat agar penyaluran KIP dapat berlangsung secara lebih efektif, adil, dan tepat sasaran. Dengan demikian, manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta didik yang benar-benar memenuhi kriteria penerima bantuan pendidikan.

Hasil penelitian di Madrasah Aliyah NU Maron menunjukkan bahwa kepala madrasah memiliki peran strategis dalam optimalisasi pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab dalam proses pendataan dan verifikasi calon penerima bantuan, tetapi juga mengoordinasikan pengusulan penerima, memfasilitasi proses pencairan dana, memberikan arahan kepada siswa dan orang tua mengenai pemanfaatan dana sesuai tujuan program, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan KIP di lingkungan madrasah. Peran tersebut menunjukkan bahwa kepala madrasah tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai pemimpin yang memastikan program bantuan pendidikan terlaksana secara efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi KIP di MA NU Maron sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepala madrasah dalam membangun koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk guru, tenaga administrasi, siswa, orang tua, dan instansi terkait. Melalui koordinasi yang baik, proses pendataan dan pengusulan penerima bantuan dapat dilakukan secara lebih sistematis sehingga peluang terjadinya kesalahan data dapat diminimalkan. Selain itu, kepala madrasah juga berperan dalam memastikan

bahwa bantuan yang diterima benar-benar dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan pendidikan siswa.

Meskipun demikian, pengelolaan KIP masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala yang ditemukan adalah proses pemutakhiran data calon penerima yang memerlukan koordinasi berkelanjutan karena kondisi sosial ekonomi keluarga peserta didik dapat berubah sewaktu-waktu dan tidak selalu segera tercatat dalam sistem pendataan. Selain itu, sebagian orang tua masih mengalami kesulitan dalam memahami prosedur pencairan maupun mekanisme penggunaan dana bantuan. Kondisi tersebut mengharuskan kepala madrasah bersama tim pengelola untuk terus melakukan pendampingan, sosialisasi, dan komunikasi secara intensif agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Habibi, 2025) yang menjelaskan bahwa sekolah memiliki posisi strategis dalam mendukung keberhasilan implementasi Program KIP karena berinteraksi secara langsung dengan peserta didik dan orang tua. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Jemani (2023) yang menegaskan pentingnya peran sekolah dalam memberikan pendampingan selama proses pencairan dana serta edukasi mengenai penggunaan bantuan untuk kebutuhan pendidikan. Namun demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih spesifik dengan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan KIP tidak hanya bergantung pada sistem program, tetapi juga pada kapasitas kepemimpinan kepala madrasah dalam mengelola koordinasi, melakukan pengawasan, serta menyelesaikan berbagai kendala administratif yang muncul selama pelaksanaan program.

Dalam perspektif manajemen pendidikan, kepala madrasah berperan sebagai pengelola sumber daya yang bertanggung jawab memastikan setiap tahapan program berjalan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, kemampuan manajerial kepala madrasah menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan KIP, khususnya dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program bantuan pendidikan.

Peran tersebut juga memiliki relevansi yang kuat dengan nilai-nilai kepemimpinan dalam Islam. Prinsip amanah dan keadilan yang menjadi landasan pengelolaan bantuan pendidikan tercermin dalam firman Allah Swt. pada Surah An-Nisā' ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisā’: 58).

Ayat tersebut menegaskan bahwa setiap amanah harus diberikan kepada pihak yang berhak serta dikelola dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab. Dalam konteks pengelolaan KIP, nilai amanah tercermin dalam upaya kepala madrasah untuk memastikan bantuan diterima oleh peserta didik yang memenuhi kriteria, sedangkan nilai keadilan diwujudkan melalui proses pendataan, verifikasi, dan pengawasan yang dilakukan secara objektif dan transparan. Dengan demikian, pengelolaan KIP tidak hanya menjadi tanggung jawab administratif, tetapi juga merupakan bentuk implementasi nilai-nilai kepemimpinan Islam dalam tata kelola pendidikan.

Berdasarkan temuan penelitian, peningkatan kapasitas manajerial kepala madrasah dan tim pengelola menjadi kebutuhan yang penting untuk mendukung keberhasilan program secara berkelanjutan. Penguatan kompetensi dalam pengelolaan data, administrasi bantuan pendidikan, komunikasi dengan orang tua, serta pengawasan penggunaan dana akan membantu mengatasi berbagai kendala yang masih ditemukan dalam pelaksanaan program. Sejalan dengan temuan Sartika et al., (2025), efektivitas dan akuntabilitas Program KIP akan semakin optimal apabila didukung oleh sistem pengelolaan yang baik, pengawasan yang berkelanjutan, serta kepemimpinan madrasah yang mampu menjalankan fungsi amanah dan keadilan secara konsisten. Dengan demikian, manfaat KIP dapat dirasakan secara maksimal dalam mendukung keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah memiliki peran strategis dalam menentukan efektivitas pengelolaan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Madrasah Aliyah NU Maron. Peran tersebut diwujudkan melalui kemampuan dalam mengoordinasikan proses perencanaan, verifikasi data penerima, penyaluran bantuan, pengawasan penggunaan dana, hingga evaluasi program secara berkelanjutan. Pengelolaan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel terbukti mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan, meningkatkan efisiensi pelaksanaan program, serta memberikan kontribusi

terhadap keberlangsungan proses belajar peserta didik.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan implementasi Program KIP tidak hanya bergantung pada ketersediaan bantuan finansial dari pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala madrasah dalam mengelola program secara efektif. Kepemimpinan yang mampu membangun koordinasi dengan guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya berkontribusi terhadap terciptanya tata kelola program yang lebih optimal. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas manajemen di tingkat madrasah merupakan faktor penting dalam memaksimalkan manfaat Program KIP bagi peningkatan mutu pendidikan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian manajemen pendidikan Islam dengan menempatkan peran kepala madrasah sebagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan bantuan pendidikan di tingkat satuan pendidikan. Sementara itu, secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kepala madrasah, pengelola pendidikan, dan pemangku kebijakan dalam memperkuat sistem pengelolaan Program KIP yang lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran sehingga manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh peserta didik yang berhak menerimanya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardyan, E., Boari, Y., Akhmad, A., Yuliyani, L., Hildawati, H., Suarni, A., Anurogo, D., Ifadah, E., & Judijanto, L. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif Dan Kuantitatif Di Berbagai Bidang*. Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Disty, A. A. (2025). *Pengaruh Program Indonesia Pintar Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik Di Mts Al-Khairiyah Kangkung Bandar Lampung*. Uin Raden Intan Lampung.
- Firdaus, S., Aini, N., Aulia, N., & Sudirman, S. (2024). Manajemen Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Fungsi Guru Di Sma Negeri 3 Praya. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 9(3), 2168–2173. <https://doi.org/10.29303/Jipp.V9i3.2345>
- Habibi, I. A. (2025). Efektivitas Penggunaan Kartu Indonesia Pintar (Kip): Analisis Dampak Dan Tantangan Implementasi Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Sekolah. *Al-Amin: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 13–29.

- Halim, A. (2024). *Analisis Investasi Dan Aplikasinya: Dalam Aset Keuangan Dan Aset Riil Edisi 3*. Penerbit Salemba.
- Kurnia Mira Lestari, Zulfani Sesmiarni, & Ramadhoni Aulia Gusli. (2024). Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Manajemen Mutu Terpadu Lembaga Pendidikan Di Sman 3 Bukittinggi. *An-Nahdlah: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(2), 319–327. <https://doi.org/10.51806/An-Nahdlah.V4i2.181>
- Lestari, A., Sumual, T. E. M., & Usuh, E. J. (2023). Literatur Review: Analisis Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sekolah Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Jurnal Bina Gogik*, 10(1), 184–198. <https://doi.org/10.61290/Pgsd.V10i1.353>
- Lestari, N., Aprisa, M. T., & Dewi, D. E. C. (2024). Eksplorasi Strategi Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif; Studi Perbandingan Metode Tesis Di Kalangan Akademisi. *Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 4(3), 380–388.
- Mardatila, A. (2025). Peran Kepala Sekolah Dalam Mengelola Risiko Operasional Lembaga Pendidikan. *Jurnal Media Akademik (Jma)*, 3(12).
- Mardizal, J., Anggriawan, F., Ghazali, A., Haddar, G. Al, & Arifudin, O. (2023). Model Kepemimpinan Transformational, Visioner Dan Authentic Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Era 4.0. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 2994–3003. <https://j-innovative.org/index.php/innovative/article/view/5195>
- Mira, Y. F. (2024). *Implementasi Budaya Sekolah Dalam Membentuk Karakter Religius Anak Usia Dini Di Ra Al-Hikmah Bandar Negeri Suoh Lampung Barat*. Uin Raden Intan Lampung.
- Mohamad, M., & Syahnur, M. H. (2025). Penerapan Immersive Marketing Di Indonesia: Pendekatan Kualitatif Deskriptif Dengan Analisis Tematik. *Economics And Digital Business Review*, 6(2.1), 367–381.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah Kartu Indonesia Pintar Berhasil Menurunkan Angka Putus Sekolah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 72.
- Rachman, A. (2025). *Peran Ma'had Al Jami'ah Dalam Membina Kompetensi Tahfidz Al Qur'an Juz 30 Bagi Mahasiswa Penerima Beasiswa Kip Kuliah Universitas Islam Negeri Kh Abdurrahman Wahid Pekalongan*. Uin Kh Abdurrahman Wahid

Pekalongan.

Samsu, S. A. (2025). *Analisis Kebijakan Dalam Manajemen Pendidikan Islam*. Zabags Qu Publish.

Sariri, F., & Prabawati, I. (2024). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (Kip-K) Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 238–251. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p238-251>

Sartika, D., Masduki, M., & Rochimah, H. (2025). Akuntabilitas Transparansi Pengelolaan Bos Dalam Optimalisasi Mutu Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 10(2), 697–707.

Yusni, I. S., Sejarah, P., & Sriwijaya, U. (2026). *Peran Dan Kedudukan Kepala Sekolah Sebagai Pemimpin Dalam Lembaga Pendidikan*. 2(2), 3714–3721.